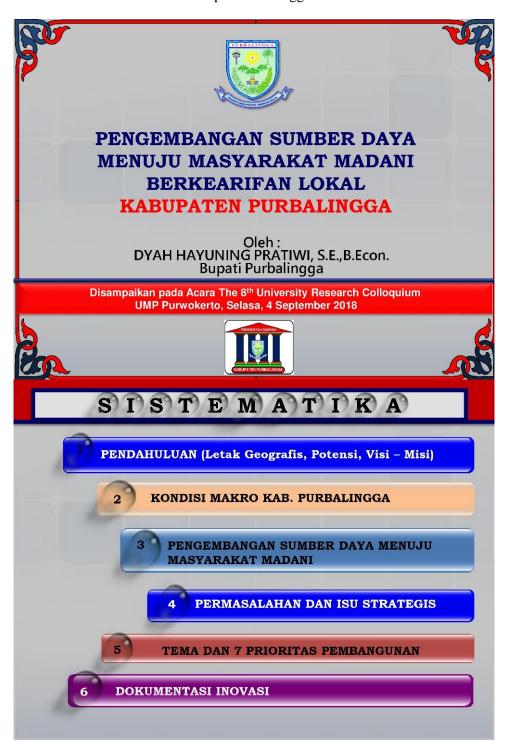


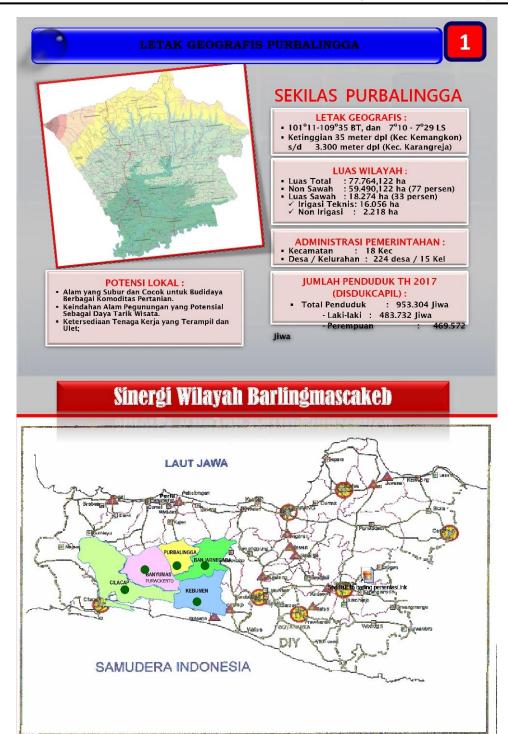
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MENUJU MASYARAKAT MADANI BERKEARIFAN LOKAL KABUPATEN PURBALINGGA

Dyah Hayuning Pratiwi

Bupati Purbalingga





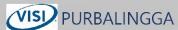




- TEMPAT LAHIR JENDERAL SOEDIRMAN (24 JANUARI 1916 DI DESA BANTARBARANG KECAMATAN REMBANG)
 DIBANGUN BANDARA JENDERAL BESAR SOEDIRMAN
- 2.
- **PURBALINGGA PUSAT KERAJINAN KNALPOT** MEMPRODUKSI KNALPOT DAN BERBAGAI KOMPONEN OTOMOTIF KENDARAAN. SAA INI TERDAPAT 178 UNIT USAHA INDUSTRI KNALPOT MOBIL / MOTOR DAN MAMP MEMPRODUKSI 313.380 UNIT KNALPOT PER TAHUN. PEMASARAN KNALPO PURBALINGGA HAMPIR MENJANGKAU KE SELURUH KOTA DI INDONESIA.
- PURBALINGGA PUSAT INVESTASI DAN INDUSTRI (TERDAPAT 21 PMA).
- PURBALINGGA PUSAT PRODUKSI BULU MATA DAN WIG (TERBESAR KE 2 SE DUNIA SETELAH GUANGZHOU, CHINA) JUMLAH PERUSAHAAN YANG ADA SEBANYAK 21 PMA, 10 PMDN, 274 PLASMA, DAN

1 SENTRA INDUSTRI KERAJINAN RAMBUT. INDUSTRI TERSEBUT MENYERAP TIDAK KURANG DARI 45.000 TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN INTI DAN 23.130 TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN PLASMA. HAMPIR 90 % PRODUKNYA DI EKSPORT HAMPIR KE SELURUH NEGARA EROPA, AMERIKA, AFRIKA, TIMUR TENGAH, ASIA DAN CHINA DAN TERDAPAT SEKITAR 60.000 TENAGA KERJA

PURBALINGGA PUSAT PARIWISATA (PERINGKAT 4 DI JAWA TENGAH SETELAH KOTA MAGELANG, SOLO, & SEMARANG)



Purbalingga Mandiri & Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia



- Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih, Dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima Kepada Masyarakat;
- Mendorong Kehidupan Masyarakat Religius, Serta Mengembangkan Paham Kebangsaan, Guna Mewujudkan Rasa Aman Dan Tenteram Dalam Masyarakat Yang Berdasar Pada Realitas Kebhinekaan;
- 3. Mengupayakan Pemenuhan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan & Papan Secara Layak;
- 4. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, Utamanya Melalui Peningkatan Derajat Pendidikan Dan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Rakyat, Dengan Mendorong Simpul-simpul Perekonomian Utamanya Industri Pengolahan Dan Manufaktur, Perdagangan, Jasa, Pariwisata Dan Industri Kreatif, Dengan Tetap Berorientasi Pada Kemitraan Dan Pengembangan Potensi Lokal, Serta Didukung Dengan Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Pengembangan Usaha, Investasi Dan Penciptaan Lapangan Keria: Penciptaan Lapangan Kerja;
- Mewujudkan Kawasan Perkotaan Dan Perdesaan Yang Sehat Dan Menarik Untuk Melaksanakan Kegiatan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Melalui Gerakan Masyarakat, Yang Didukung Dengan Penyediaan Infrastruktur Wilayah Yang







KOMPARASI IPM TAHUN 2016

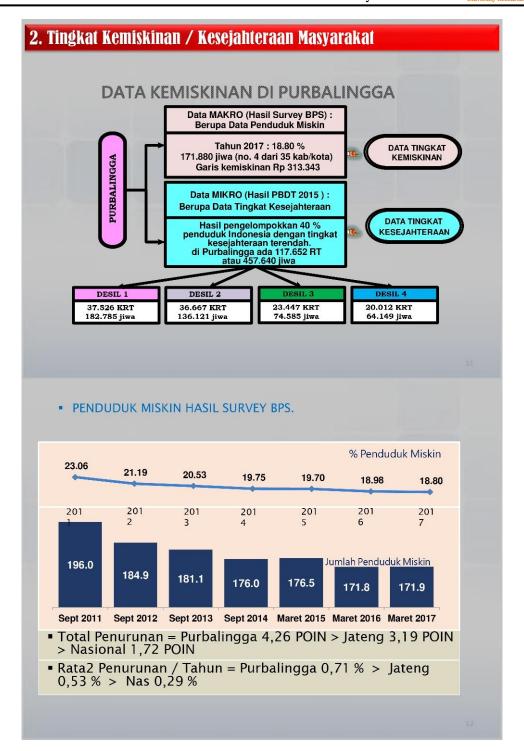
NAMA WILAYAH	АНН	EYS/HLS	MIYS / RLS	Pengeluaran per Kapita (Rp)	IPM
INDONESIA	70.90	12.72	7.95	10.420.000	70.18
JAWA TENGAH	74.02	12.45	7.15	10.153.000	69.98
CILACAP	73.11	12.29	6.90	9.677.000	68.60
BANYUMAS	73.23	12.58	7.39	10.554.000	70.49
PURBALINGGA	72.86	11.93	6.86	9.159.000	67.48
BANJARNEGARA	73.69	11.40	6.26	8.400.000	65.52

PERKEMBANGAN IPM PURBALINGGA



URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Ranking
Purcasing Power Parity (ekonomi)	8.450	8.535	8.539	8.938	9159	25
Harapan Lama Sekolah (pendidikan)	10,98	11,1	11,51	11,78	11,93	28
Rata-2 Lama Sekolah (pendidikan)	6,44	6,68	6,84	6,85	6,86	19
Usia Harapan Hidup (kesehatan)	72,69	72,76	72,8	72,8	72,86	32

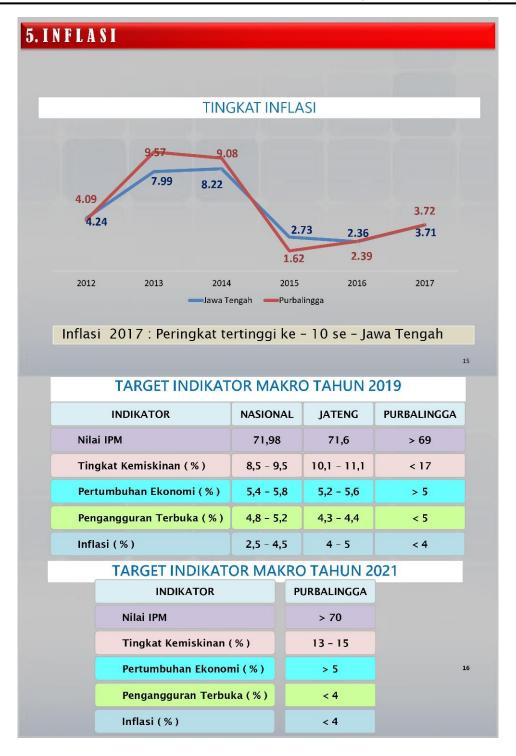




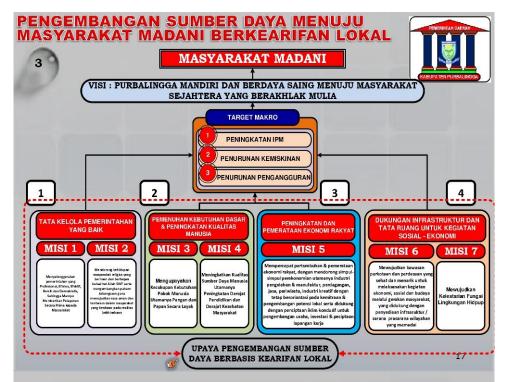












KETERKAITAN VISI DAN MISI DENGAN PERWUJUDAN MASYARAKAT MADANI

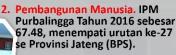
- Masyarakat Madani atas sering disebut civil society adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya
- Unsur terwujudnya masyarakat madani antara lain adalah : Keadilan sosial, Demokrasi, Pluralisme, dan Toleransi
- Dengan terwujudnya Visi Misi maka akan terwujud pula Masyarakat Madani
- Untuk mewujudkan Visi Misi perlu dilakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial, yang artinya mengurangi kemiskinan, termasuk di dalamnya meningkatkan IPM dan mengurangi pengangguran.
- Melalui upaya upaya untuk mewujudkan Misi 1 Misi 7 dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi lokal sebenarnya merupakan upaya dalam mewujudkan masyarakat madani
- Upaya Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan IPM merupakan upaya dalam perwujudan masyarakat madani





1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Jumlah Penduduk miskin Purbalingga Tahun 2017 18,80 % nenempati peringkat ke-4 di rovinsi Jateng (BPS).



AHH 2016: 72.86 (Peringkat

HLS 2016: 11.93 (Peringkat

RLS 2016 : 6.86 (Peringkat

22)

PPP 2016: Rp 9.159.000

PeningResingkat 26)ng konomi PDRB per kapita Tahun 2016 sebesar Rp. 21,532,057

1) Proporsi 3 sektor dominan: Sektor Pertanian (28,53%), Sektor Industri Pengolahan (26,33%), dan Sektor Perdagangan (12,41%); 2) Jumlah Usaha Mikro 82.197 Unit, Kecil 5534, Menengah & Besar 791 Unit. 3) TPT Tahun 2017 sebesar 5,33 % 4) Penduduk sebagian besar bekerja di sektor industri (29,66 %), disusul sektor pertanian (23,96 %), dan sektor perdagangan (22,06 %) 5) Sebagian besar perempuan bekerja di sektor industri (50,1 %), sementara laki-laki yang bekerja di sektor industri hanya 15,35 % 6) Sebagian besar laki-laki yang bekerja di sektor pertanian (32,39%), sementara perempuan yang bekerja di sektor pertanian hanva 11.92%.

4. Infrastruktur. Purbalingga sangat membutuhkan dukungan infrastruktur untuk Peningkatan Akses Wilayah, Pendukung Kedaulatan Pangan, Peningkatan Cakupan Air Bersih, Penanganan Persampahan, dan Perumahan Rakyat dll.

(Panjang Jalan 866,3 KM → Kondisi Baik 741,4 KM (85,5 %); Sedang 78,5 KM (9,2 %) dan Rusak 46,4 KM (5,3 %);

Panjang Jaringan Irigasi 327 KM→Kondisi Baik 138 KM (42,1%); Sedang 69,6 KM (21,2%); dan Rusak 120,4 KM (36,7 %);

Cakupan Pelayanan Air Barsih 80,64 % → Perpipaan 31,96 % dan

Non Perpipaan 48,68 % Cakupan Pelayanan Sanitasi 84,7 %.

5. Pelestarian Lingkungan Hidup.

Terjadinya penurunan kualitas LH dan Bencana Alam

- Penurunan ketersediaan air bersih / air minum pada musim kemarau dan
- Menurunnya Kualitas Air Baku akibat aktifitas Pertanian dan Industri
- Bencana Longsor dan Banjir di Purbalingga bagian utara, yang merusak Permukiman dan Infrastruktur Wilayah (jembatan, jaringan irigasi, sekolah, dll);
- Permasalahan Sampah dan Limbah (Cakupan Pelayanan Sampah Terangkut baru 10 %, Berakhirnya umur teknis TPA Sampah Banjaran, Belum tersedianya IPLT, Belum Tersedia TPA Limbah B3 (Pabrik, RS), dan Belum tersedianya TPS3R











Prioritas 1:

Pemenuhan Kebutuhan Pokok, fokus

1. PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN

- Mendukung Pendistribusian Beras Sejahtera / Rastra.
- Pengalokasian Beras dan Daging Bagi Masyarakat Miskin
- Pemberian makanan Tambahan untuk Ibu Hamil, Balita dan Bayi penderita Gizi Buruk / Kurang;
- Penguatan Cadangan Pangan (lumbung), penganeka-ragaman pangan dan kemudahan distribusi pangan.

2. PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI:

- Rehab Rumah Tidak Layak Huni / RLTH Oleh Pemerintah.
- Gerakan RLTH Oleh Masyarakat, Organisasi, Perusahaan.
- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh.
- Fasilitasi Pengembangan Perumahan Formal.





Prioritas 2:

Peningkatan Kualitas Manusia, fokus

1. PENINGKATAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN

- Pemeratan serta Peningkatan Jumlah dan Kualitas Guru:
- Pemerataan dan Peningkatan Sarpras Pendidikan;
- Mendorong Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan.
- Pemberian Bea Siswa dan bantuan Biaya Pendidikan;

2. PENINGKATAN DAN PEMERATAAN AKSES KESEHATAN

- Mengutamakan upaya Promotive dan Preventive melalui Gerakan Masyarakat menuju Paradigma Sehat;
- Mewujudkan Universal Health Coverage / UHC Jaminan Kesehatan;
- Peningkatan Kelas atau Pembangunan RS / Puskesmas
- Penyediaan Tenaga Kesehatan yang Memadai;

3. PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DAN PENGENDALIAN **PENDUDUK**





Prioritas 3:

Peningkatan Daya Saing Ekonom fokus pada:

- Pengembangan destinasi wisata, inc
- Peningkatan kompetensi tenaga ker Penumbuhan wira usaha baru;
- Pengembangan industri pengolahan berbahan baku lokal;
- Pendampingan untuk penguatan kelembagaan dan jejaring usaha mikro;
- Revitalisasi sarana prasarana ekonomi wilayah;
- Pengembangan komoditas pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan yang memiliki nilai tambah tinggi serta sesuai dengan potensi wilayah;
- Introduksi teknologi untuk peningkatan produksi pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan;
- Penciptaan iklim usaha yang kondusif



LIK LOGAM



Prioritas 4:

Pengurangan Kesenjangan Wilayah

- ✓ Pengembangan Bandara JB Soedirman beserta Sarpras Pendukungnya;
- ✓ Peningkatan kualitas jalan dan jembat guna peningkatan akses wilayah;
- ✓ Peningkat<mark>an p</mark>emenu<mark>h</mark>an kebutuhan prasarana permukiman perkotaan dan Perdesaan: jalan, pasar, listrik, air bersih, sanitasi, dll;
- ✓ Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi Pertanian:
- ✓ Pengendalian dan pemanfaatan ruan secara efektif.
- ✓ Peningkatan kualitas prasarana pemerintahan → sarpras pelayanan;
- Peningkatan layanan angkutan umum







Prioritas 5:

Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, fokus pada : eningkatan pengelolaan SDA-LH melalui :

- Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah (termasuk TPS-3R dan TPA), serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- Pengelolaan limbah rumah tangga secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat (sanitasi komunal);
- Pengembangan taman / Ruang Terbuka Hijau tematik;



Prioritas 6:

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, fokus

- •Pedgembangan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata-laksana organisasi, peningkatan SDM dan pembinaan kepegawaian secara merit system;
- Perwujudan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, melalui mengembangkan egoverment termasuk smart city.
- Peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan inovasi untuk pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.
- Membangun kerjasama dengan stakeholders secara luas (LIPI, PT, Pemda Lain, Perusahan, Komunitas, dll) untuk percepatan upaya pemanfaatan potensi wilayah dan sumberdaya manusia, guna peningkatan











Prioritas 7:

Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum,

- fokus pada : Peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan beragama melalui ketahanan ideologi Pancasila, semangat nasionalisme dan patriotisme, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorism, hate speech dan boax
- Optimalisasi Penanganan Narkoba, Ko Sosial dan Horisontal;
- Terselenggaranya Pemilihan Presiden Wakil Presiden dan Legislatif yang jujur, aun dan kondusif di Kahunaten Purhalingga







DOKUMENTASI INOVASI

DOKUMENTASI INOVASI DAN BERBAGAI **UPAYA YANG DALAM** MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA – MADANI



PADA TANGGAL 25 OKTOBER 2016 DI SEMARANG, GUBERNUR JAWA TENGAH MENANDATANGANI MOU DENGAN 15 KABUPATEN YANG TINGKAT KEMISKINANNYA DI ATAS TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI TERMASUK KABUPATEN PURBALINGGA DAN 15 REKTOR DARI 15 PERGURUAN TINGGI YANG MASING - MASING BERMITRA DENGAN 15 KABUPATEN



INOVASI

6



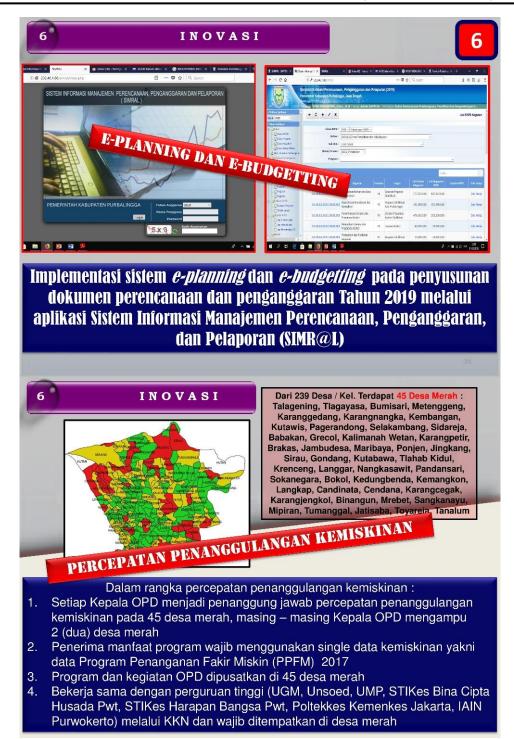
Penerapan Teknologi guna mendukung Pembangunan Daerah melalui MoU Pemkab. Purbalingga dengan BPPT

Pelaksanaan dan Implementasi:

- Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang Informasi, Energi dan Material
- Pengkajian dan Penerapan Teknologi di bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan
- Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang Industri Rancang Bangun dan Rekayasa

Melalui Kerja Sama Pemkab. Purbalingga dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah Kabupaten Purbalingga, meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian, penerapan, pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga















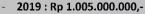
PENANGANAN ANAK USIA SEKOLAH YANG TIDAK SEKOLAH UNTUK KEMBALI SEKOLAH MELALUI KARTU PURBALINGGA PINTAR

Program ini menyisir anak usia sekolah yang tidak bersekolah (di luar sekolah) untuk kembali ke sekolah, dengan diberikan bantuan untuk perlengkapan sekolah (biaya personal):

: Rp 1.000.000,- per anak 1) Siswa SD 2) Siswa SMP : Rp 1.500.000,- per anak

Anggaran

2017: Rp 629.300.000,-2018 : Rp 1.005.000.000,-







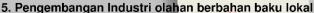


GERAKAN BELA – BELI PRODUK PURBALINGGA

Merupaka Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kluster – 3 berupa Pemberdayaan UMKM antara lain melalui :



- 1. Memassalkan dan memasifkan Gerakan Bela Beli Produk sebagai gerakan bangga dan mencintai produk lokal.
- 2. Mewajibkan ASN dan BUMD untuk menggunakan seragam Batik Lawa (batik khas Perbalingga)
- 3. Pada setiap jamuan snack dan jamuan makan wajib menggunakan Produk UMKM Produk Bela Beli Purbalingga
- 4. Layanan Rumah Usaha Mikro (RUMIKO) sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro untuk mendukung gerakan Bela-Beli Produk Purbalingga dengan memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam menghasilkan produk yang berkualitas









BELI - BELI

PERBUP 31/2017 TENTANG BELA BELI PURBALING

Merupakan sebuah Gerakan untuk mendorong Masyarakat Purbalingga agar Cinta dan Membela Produk Purbalingga, dengan Cara Membeli Produk Lokal Purbalingga

TUJUAN:

- 1. Mendorong dan Meningkatkan Kecintaan dan Budaya Konsumsi PRODUK LOKAL;
- 2. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas PRODUK LOKAL untuk Menggantikan Produk NON LOKAL;
 - 3. Mendorong Pemanfaatan Bahan Baku dan Pengembangan Potensi Lokal;
- 4. Mengurangi Konsumsi Produk NON LOKAL, shg Mengurangi Uang Keluar Dari Purbalingga.
- 5. Menambah Perputaran Uang dan Investasi di Purbalingga, shg Meningkatkan Lapangan Kerja.

POIN PENTING BELA BELI PURBALINGGA

KEGIATA

- Menggunakan Logo Bela Beli;
- Mengutamakan Bahan Baku Lokal Dihasilkan / diproduksi Oleh UMK Purbalingga
- Rumah Makan/Hotel/Tempat Wisata Wajib Memfasilitasi Produk Lokal;
- Dilakukan oleh Perorangan/kelompok / Badan Usaha:
- Minimarket / Toko Modern Wajib Memfasilitasi Produk Lokal: Kantin Sekolah Menjual Produk Lokal;



KREDIT MAWAR

SUKSESKAN GEHAKAN

//

RODUK MONESIA

- Pemerintah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Perwira meluncurkan program Kredit "Mawar" (melawan Rentenir) bagi pelaku usaha kecil dengan suku bunga 0%
- Besarnya Plafon kredit yang diberikan minimal 500 ribu dan maksimal 2,5juta rupiah dengan jangka waktu kredit maksimal sampai dengan 12 (dua belas) bulan
- Adapun persyaratan nasabah kredit Mawar adalah:
 - Warga Negara Indonesia
 - Cakap Hukum (umur minimal 21 tahun)
 - Domisili dan lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten Purbalingga
 - Usaha telah berjalan minimal 1 tahun
 - Bidang usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Norma agama, susila dan tidak Melanggar hukum serta mempunyai prospek yang baik
- Persyaratan Administrasi Kredit Mawar:
 - Fotokopi KTP Suami dan istri (bagi yang sudah menikah)
 - Fotokopi Kartu Keluarga
 - Surag keterangan dari Desa / Kelurahan mengetahui Camat



UBSIDI BUNGA

- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga mengalokasi anggaran untuk subsidi bunga bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Rp 500 juta
- Sasaran subsidi bunga para pelaku usaha mikro dan kecil yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Purbalingga
- Syarat & Kriteria :
 - Syarat administrasi ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur dan
 - Telah memiliki jaminan pasar bagi produknya.
 - Plafon kredit maksimal Rp 50 juta.
 - Pemberian subsidi bunga paling banyak 50 persen dari bunga kredit yang berlaku pada lembaga keuangan bersangkutan, atau setinggi-tingginya 1 persen perbulan.
 - Subsidi bunga juga diberikan maksimal hanya 12 bulan

















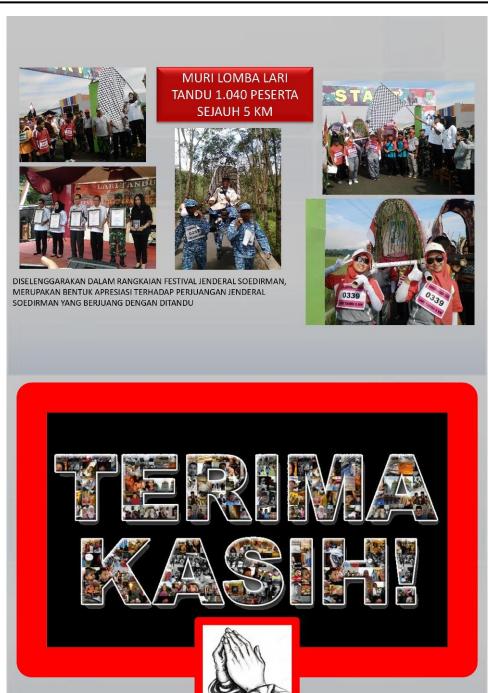


HIDUP. SEKALIGUS MENGAJAK MASYARAKAT TIDAK KONSUMTIF, KETIKA HARGA CABAI TINGGI

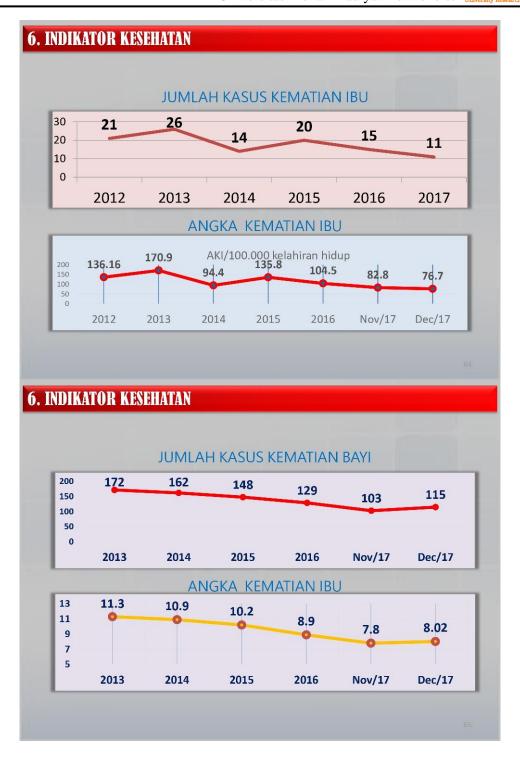












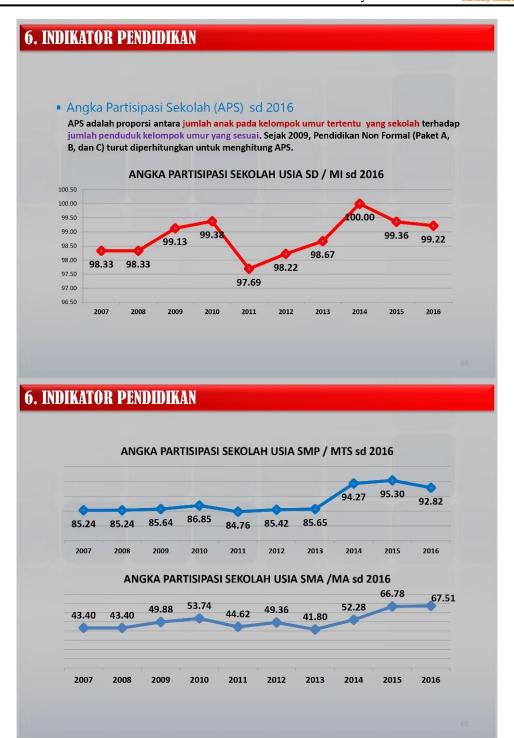




KINERJA URUSAN PENDIDIKAN

INDIKATOR	%	
Angka Melek Huruf penduduk usia > 15 Th	93,32	
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	109,91	
 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 	102,36	
 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A 	95,34	
 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B 	73,73	
 Angka Putus Sekolah SD/MI 	0,03	
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,48	
Angka Kelulusan SD/MI	100	
Angka Kelulusan SMP/MTs	99,72	
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	103,21	







6. INFRASTRUKTUR

KINERJA INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN

- Panjang Jalan Aspal = 866,3 KM → Kondisi Baik 741,4 KM (85,5 %); Sedang 78,5 KM (9,2 %) dan Rusak 46,4 KM (5,3 %);
- Panjang Jaringan Irigasi 327 KM→Kondisi Baik 138 KM (42,1%); Kondisi Sedang 69,6 KM (21,2%); dan Rusak 120,4 KM (36,7 %);
- Cakupan Pelayanan Air Bersih 80,64 % → Perpipaan 31,96 % dan Non Perpipaan 48,68 %;
- Cakupan Pelayanan Sanitasi 84,7 %;